

EFEKTIVITAS KERJASAMA INDOMALPHI TERHADAP KEAMANAN DI BIDANG KEMARITIMAN INDONESIA

Oleh: Andre Bob Rinaldi Sitompul

Email: andrebobrinaldisitompul@gmail.com

Pembimbing: Dr. Umi Oktyari Retnaningsih, MA

Bibliografi: 21 Buku, 32 Jurnal, 36 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293

Telp: 0761-63272/ Fax: 0761-566821

Abstract

The high incidence of crime and piracy in the Sulu-Sulawesi Sea has an impact not only on bordering countries but also for user countries that use this route as cargo ship traffic. Indonesia, Malaysia, and the Philippines responded to this security threat by establishing security cooperation in the form of the Indomalphi Trilateral security cooperation. For this reason, this study describes how Indomalphi security cooperation can reduce security threats in the Sulu-Sulawesi Sea.

This study uses a neorealism perspective developed by Kenneth Waltz, where the main national interest is security and justifies cooperation in the formation of joint securities. The author uses the level of analysis of the nation-state, namely, the behavior of the nation-state as a unified whole as the dominant actor in international relations. The author uses the theory of regime effectiveness proposed by Arild Underdall in explaining the effectiveness of the regime that underlies the formation of cooperation security. To describe this collaboration, the authors collect data from books, journals, websites, dictionaries, Ministry of Defense reports, and ReCAAP on maritime security cooperation. Then processed and analyzed to answer this research question.

The results show that the cooperation between Indonesia, Malaysia, and the Philippines has given good results for each country, such as decreasing the rate of ship piracy, illegal fishing, and smuggling of illegal goods as well as making it easier to resolve the kidnapping of Indonesian hostages at the Sulu Sulawesi Sea border in 2016-2019.

Keywords: Trilateral Cooperation, Security, Sulu Sea, Ship Piracy

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan situasi global saat ini menjadikan masalah keamanan non-tradisional tidak lagi dapat di atasi negara-negara di dunia secara unilateral.¹ Oleh karena itu negara perlu bekerja sama dan saling ketergantungan satu sama lain.² Masalah keamanan non-tradisional seringkali mengeksploitasi wilayah maritim yang terjadi di kawasan Asia Tenggara menyebabkan kekhawatiran pada lalu lintas jalur perdagangan internasional khususnya pada tingkat kawasan regional. Kejahatan lintas negara yang terorganisasi berkembang cepat dan sifatnya melampaui batas negara membutuhkan penyelesaian secara kolektif dan terkoordinasi melalui kerjasama yang baik bagi tiap-tiap negara.

Laut Sulu dikenal sebagai jalur alternatif menuju Samudera Hindia melalui beberapa choke point yang ada di Indonesia berbatasan dengan Malaysia dan Filipina. Wilayah perairan Sulu memiliki nilai strategis dan dimanfaatkan untuk kepentingan banyak negara. Ribuan kapal tanker minyak dan kapal dagang melintasi garis itu. Kemudian juga karena lokasinya yang potensial, dan tingginya intensitas aktivitas laut, jalur ini menghadapi sejumlah ancaman, seperti pelanggaran wilayah karena posisinya yang tepat di perbatasan tiga negara.

¹ Mely Callabero-Anthony, *Non-Traditional security in Asia: Issues Challenges and Framework for Action*. Singapore : Institute of Asian Studies, 2013), hlm. 5. Pada 24 Juli 2020

² Heiner Hanggi, Ralf Roloff, & Jurge Ruland, *Interregionalism and International Relations*, (London: Routledge, 2006). Lihat juga

Menyadari pentingnya keamanan maritim, negara pesisir membangun mekanisme kerja sama keamanan multilateral untuk menangani masalah tersebut dengan menyepakati trilateral maritime patrol, kerjasama trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina atau secara resmi bernama INDOMALPHI adalah kerjasama minilateral yang di bangun oleh tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Filipina) untuk mengatasi keamanan maritim pada perbatasan teritorial masing-masing negara. Pada 14 Juli 2016 di Jakarta, para pemimpin pertahanan tiga negara; Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein dan Menteri Pertahanan Filipina Delvin N Lorenzana, menandatangani perjanjian kerjasama trilateral. Pengaturan kerjasama trilateral *indomalphi* bertujuan untuk mendorong implementasi Standard Operating Procedures (SOP) untuk patroli Maritim serta memberikan bantuan dalam berbagi informasi intelijen dan rencana komunikasi gabungan³. Ini merupakan langkah pertama dalam peningkatan keamanan di wilayah maritim di Indonesia.

Tinjauan Teori

Perspektif

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perspektif Neorealisme yang dikembangkan oleh

Callabero, *Non-Traditional Security*, hlm 6. Pada 24 Juli 2020

³ *Are-minilaterals-the-future-of-asean-security/* <https://www.eastasiaforum.org/2017/09/30/> Pada 24 Juli 2020

Kenneth Waltz melihat *power* dari pandangan yang berbeda, kepentingan nasional yang utama adalah *security* dan menghalalkan kerjasama dalam pembentukan sekuritas bersama.⁴ Faktor keamanan mendorong terbentuknya sebuah rezim keamanan yang di dasari oleh *self interest* atau kepentingan nasional aktor-aktor yang terlibat dalam rezim serta *security dilemma* atau dilema keamanan yang menjadi kondisi terbentuknya kerjasama keamanan antar aktor. Sebuah kerjasama keamanan di kategorikan sebagai rezim apabila terdapat perubahan perilaku atau *behavioral change* sesuai dengan dasar pembentukan rezim tersebut dan hal itu didasari oleh aspek politisi masing-masing aktor.

Teori Efektivitas Rezim

Penulis meminjam kerangka teoretis Arild Underdall tentang bagaimana rezim diukur keefektifannya dengan menilai bagaimana output dan outcome kerjasama Indomalphi ini. Menurut Underdall terkait efektivitas sebuah rezim, terdapat usaha dalam membangun kerjasama dan mengimplementasikannya. Namun permasalahannya, tingkat keberhasilan atau implementasi dari sebuah rezim bervariasi, terdapat rezim yang dapat dikatakan sukses ataupun gagal⁵. Penyebabnya ada dua hal : Pertama terdapat pada karakter dari masalah itu sendiri: beberapa masalah secara intelektual kurang rumit atau secara

politik lebih ramah dari pada yang lain, oleh karena itu lebih mudah untuk diselesaikan. Kemungkinan yang kedua, fokus pada problem-solving capacity: beberapa usaha lebih sukses dibandingkan dengan yang lainnya karena perangkat institusional yang lebih powerful atau skill dan energy yang lebih besar digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Teori Efektivitas rezim yang ditulis oleh Underdall melihat pada state behaviour yang dipengaruhi oleh kondisi security dilemma. Dalam 4 syarat nature rezim keamanan jelas terlihat bahwa diantara negara-negara harus terbentuk komitmen tunggal tentang satu kondisi keamanan yang stabil. Maka untuk menjamin keberlangsungan kondisi tersebut diperlukan rezim yang mampu mengakomodir kerjasama diantara negara-negara anggota. Meski demikian rezim tidak mampu menjamin state behaviour tertentu antara negara yang satu dengan yang lain akan berpotensi pada kerjasama negara-negara dalam rezim yang sama.

Terkait konsep efektivitas rezim, Arild Underdall melakukan pemilahan antara variabel dependen yaitu efektivitas rezim dengan variabel independen yang terdiri dua hal yaitu : tipe permasalahan, dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut¹⁹. Kemudian ada juga yang disebut *intervening variable*, sebuah variabel yang merupakan akibat dari variabel-variabel independen namun

⁴Abu Bakar Eby Hara. *Pengantar analisis politik luar negeri : dari realisme sampai konstruktivisme*. Bandung. Nuansa Cendikia. 2011. Hal 43 Pada 26 juli 2020

⁵ Arild Underdall, *Explaining Regime Effectiveness*, [Pdf], University of Oslo, Hal.1 Pada 26 juli 2020

juga bagian dari variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Intervening variable disini menggunakan level of collaboration, atau tingkat kolaborasi antara anggota dari sebuah rezim. Efektivitas rezim sebagai variabel dependen memiliki 3 komponen yang terdiri dari output, outcome, dan impact yang ada dalam rezim. Masalah menjadi susah ketika masalah itu sendiri memang membuat negara-negara tidak mau bekerjasama secara politis, karena memang susah. Malignancy ini memiliki 3 karakter antara lain Incongruity, Asymmetry dan Cumulative Cleavages. Apabila satu solusi dihasilkan melalui keputusan kolektif, maka problem solving capacity bisa dipahami sebagai fungsi saling terkait yang terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Seting kelembagaan (institutional setting) yang ada dalam rezim tersebut.

2. Distribusi kekuasaan (distribution of power) diantara aktor yang terlibat. Jika ada pembagian kekuasaan yang adil, dimana terdapat pihak dominan yang dapat bertindak sebagai leader namun tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan, dan juga ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan.

3. Skill (keahlian) dan energy (kekuatan) yang tersedia bagi rezim yang digunakan untuk mencari dan menangani permasalahan.

Dalam melihat tingkat kolaborasi sebuah rezim internasional, Underdal mengemukakan enam skala ukuran level kolaborasi, yang dapat dilihat dalam skala dibawah ini: Level of Collaboration (skala 0- 5):

0. Gagasan bersama tanpa suatu koordinasi tindakan bersama

1. Koordinasi tindakan secara diam-diam

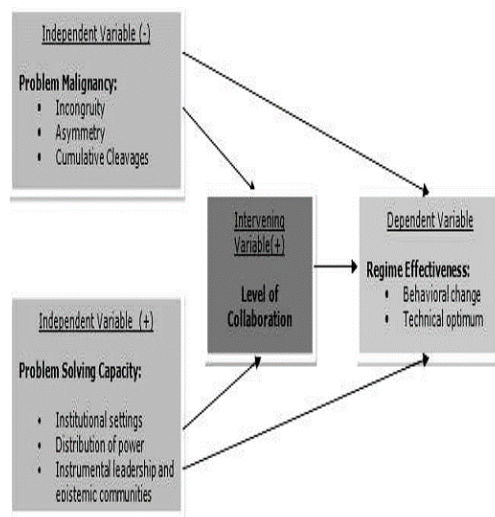
2. Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Tidak ada penilaian terpusat mengenai efektivitas dari sebuah tindakan.

3. Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Terdapat penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan.

4. Koordinasi yang terencana, dikombinasikan dengan implementasi pada level nasional. Didalamnya terdapat penilaian terpusat akan efektivitas sebuah tindakan.

5. Koordinasi dengan perencanaan dan implementasi yang menyeluruh terintegrasi, dengan penilaian terpusat akan efektivitas.

Gambar 1. Model Inti dari 3 Variabel



Rumusan Masalah

Resminya *Indomalphi* sebagai kerjasama minilateral merupakan suatu kesempatan yang akan menjadi salah

satu faktor pendukung kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang keamanan maritim. Lambatnya peran negara-negara pesisir yang saling berbatasan untuk menyadari bahwa sifat alami dari negaranya sebagai negara kepulauan atau Archipelagic State dan berujung pada Doktrin Poros Maritim serta resminya Indonesia sebagai pemimpin asosiasi regional Samudera Hindia akan membuat Indonesia semakin mudah memperluas kepentingannya, khususnya dalam keamanan maritim di perbatasan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis menarik pertanyaan penelitian berupa **“Bagaimana efektivitas kerjasama INDOMALPHI di bidang keamanan maritim?”**

Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Indomalphi sebagai bentuk kepentingan Indonesia dalam memperkuat keamanan maritim.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tingkat kasus pembajakan kapal dan perampokan di perbatasan Indonesia, Filipina, dan Malaysia 2016-2019.
3. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi efektivitas Indomalphi di bidang keamanan maritim Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan secara sistematis atau berurutan suatu peristiwa atau masalah

yang menjadi topik bahasan dari sudut pandang sebab-akibat serta penyusunan data. Dalam pelaksanaannya, metode deskriptif tidak hanya sebatas mengumpulkan data, tetapi juga meliputi analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan.

Teknik Pengumpulan Data

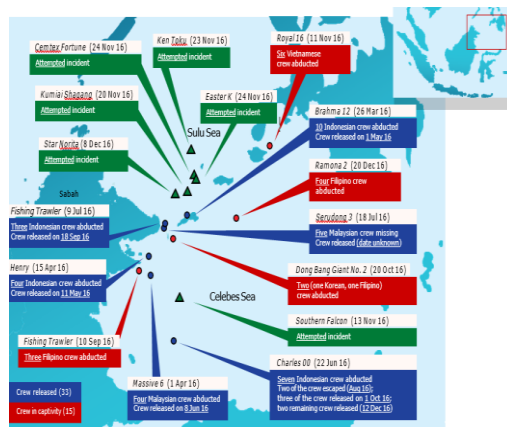
Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan metode analisis dokumen, penulis mengumpulkan data dari buku, jurnal, situs web, kamus, laporan, data dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan, dan Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery (ReCAAP) mengenai tingkat kejahatan lintas batas negara di perairan Laut Sulu. Berita dari majalah dipilih dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penggunaan *source of data* merupakan cara yang mudah bagi peneliti untuk menemukan data-data untuk dikumpulkan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN Efektivitas Kerjasama Indomalphi Dalam Kepentingan Indonesia

Keseriusan dalam menekan angka tindak kejahatan di perairan Laut Sulu yang telah dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina dalam meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan telah banyak dilakukan. Namun tentu dengan banyaknya upaya kerjasama menghadapi permasalahan tindak kejahatan yang diinisiasi oleh ketiga negara, apakah semakin mengurangi angka terjadinya aksi kejahatan di wilayah perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina? Hal tersebut yang tentunya menjadi pertanyaan

banyak pihak melihat semakin gencarnya kerjasama dan fokus pemerintah ketiga negara dalam upaya menangani permasalahan tersebut.

Gambar 2: Lokasi Terjadinya Perompakan di



Laut Sulu (2016)

Kerjasama yang efektif dan dapat menuntaskan permasalahan merupakan kerjasama yang diharapkan oleh semua pihak. Namun suatu permasalahan memiliki tingkat kesulitan tersendiri untuk dapat diselesaikan. Menurut Underdal, tingkat kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama karena karakteristik permasalahan itu sendiri yang mana terdapat permasalahan yang lebih rumit ataupun juga lebih mudah untuk ditangani.⁶ Namun penyebab lain juga dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan memiliki kemampuan yang cukup baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu juga, institusi yang menangani permasalahan tersebut memiliki power yang lebih kuat dalam menangani permasalahan yang dihadapi.⁷ Pengukuran efektivitas

dalam penelitian ini akan melihat apakah kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina pada tahun 2016 hingga tahun 2019 dapat menekan angka pembajakan di wilayah perairan Laut Sulu yang menjadi perbatasan ketiga negara.

Tingginya angka kejadian pembajakan di wilayah perairan Laut Sulu dimulai pada tahun 2016 dan perbincangan pun mulai ramai ketika terdapat kapal Indonesia yang menjadi korban pembajakan kapal di wilayah perairan Laut Sulu. Pemberitaan yang ramai tidak terlepas dari jatuhnya beberapa korban jiwa dalam kejadian pembajakan tersebut. Munculnya aksi pembajakan tersebut dikarenakan oleh kelompok separatis Abu Sayyaf yang mendiami wilayah Filipina bagian Selatan mulai kehilangan arah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga berbagai aksi pembajakan kapal tersebut adalah dampak dari kesulitan mereka dalam memenuhi kehidupan ekonomi yang pada akhirnya melakukan tindakan pembajakan dengan harapan dapat meraih keuntungan yang besar.

Pada tahun 2016, total 16 insiden penculikan awak (terdiri dari 10 aktual dan 6 percobaan insiden) yang terjadi di Laut Sulu dan perairan lepas Sabah timur yang dilaporkan ke ReCAAP ISC oleh Philippine Coast Guard (PCG) yang juga merupakan Focal Point ReCAAP untuk Filipina. Sebagian besar insiden penculikan ini

⁶ Ibid

⁷ Underdal, A. (2001). *Explaining Regime Effectiveness*. University of Oslo.

diklaim oleh kelompok teroris yang berbasis di Filipina.

Contoh Kasus Penculikan Kru Kapal

TB BRAHMA-12 merupakan kapal jenis Tug Boat (kapal tunda) yang berasal dari Indonesia. Kapal ini menggandeng Kapal Tongkang BG Anand 12 yang membawa 7.500 Metrik Ton lebih batu bara melewati Perairan Sulu untuk diekspor ke Filipina. Kapal ini memiliki 10 anak buah kapal (ABK) yang merupakan Warga Negara Indonesia. Kapal berbendera Indonesia ini ditemukan pada tanggal 26 Maret 2016 di perairan Languyan, Tawi-Tawi, Mindanao Selatan. Diduga ada insiden pembajakan yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf karena pada tanggal 27 Maret 2016 kapal tersebut dalam keadaan kosong dan di dalam Tug Boat masih penuh berisi bahan makanan yang diduga sebagai bekal perjalanan selama pelayaran. Pada saat ini belum diketahui motif dan keberadaan seluruh ABK yang berada di kapal tersebut. Pada 28 Maret 2016 didapatkan informasi bahwa Kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar 10 Milyar peso untuk 10 orang WNI ABK dari TB BRAHMA 12.⁸

Mengetahui hal tersebut pengerahan alutsista yang dilakukan TNI-AL sebagai upaya pembebasan sandera antara lain dengan menggunakan KRI SBY-591

melakukan Operasi Komodo Jaya-16 dengan mengerahkan personel sebanyak 153 orang. Seluruh unsur yang terlibat operasi pembebasan sandera kemudian berada di Tarakan pada 4 April 2016, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dan Filipina mengambil langkah setelah adanya kasus penculikan ABK WNI tersebut. Pemerintah kemudian mengirim tiga batalyon untuk memperkuat pengawasan di perairan Sabah. Kemudian menempatkan *joint task force* untuk lebih memperkuat pengawasan di wilayah tersebut.⁹ Selain hal tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan “*wait and see*” serta upaya negosiasi untuk memantau situasi kemajuan lebih lanjut. Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera tersebut.¹⁰ Pemerintah kemudian terus melakukan upaya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Filipina terkait pembebasan sandera tersebut hingga pada tanggal 6 April 2016, seluruh ABK Indonesia yang disandera berhasil diselamatkan. Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang diberikan, uang tebusan diyakini telah dibayarkan untuk menjamin pembebasan.¹¹

Kejadian serupa juga sempat dialami oleh TB Henry dan kapal tongkang Cristi yang merupakan kapal

⁸ *Indonesia kapal dibajak di Filipina* http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/a/2016/03/160329_diakses pada 3 Agustus 2021

⁹ *Peristiwa/ini.kemampuan-3-pasukan-elite-tni-buat-bebaskan-sandera-di-Filipina.* <https://www.merdeka.com/> diakses pada 3 Agustus 2021

¹⁰ *Abu-sayyaf-men-abduct-school-principal-in-basilan.* <http://newsinfo.inquirer.net/590576/> diakses pada 3 Agustus 2021

¹¹ *Kapal-indonesia-kembali-dibajak-ini-kata-menkopolkukam-* <https://nasional.sindonews.com/read/1101574/14/2> diakses pada 3 Agustus 2021

berbendera Indonesia yang dibajak dalam perjalanan dari Cebu - Filipina menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara oleh ASG. Dalam insiden itu satu anak buah kapal (ABK) tertembak, lima orang berhasil diselamatkan, tetapi empat lainnya diculik. Korban luka tembak dilarikan ke rumah sakit di Malaysia untuk menjalani perawatan dan kini dilaporkan berada dalam kondisi stabil. Demikian pula dengan lima ABK lain yang diselamatkan, kini dibawa oleh polisi maritim Malaysia ke pelabuhan Lahat Datu, Malaysia.¹²

Sehingga dalam hal ini militer Indonesia bekerja sama dengan angkatan laut Filipina serta otoritas Malaysia untuk mengatasi keadaan tersebut. Operasi pembebasan sandera mulai dilakukan sejak pihak Indonesia menerima informasi dari Filipina pada 19 April 2016 terkait kejadian tersebut. Kemudian operasi terus dilakukan hingga 15 Mei 2016 sampai semua kru kapal selamat.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah insiden selama tahun 2016 – 2019, jenis kapal yang dinaiki, jumlah ABK yang diculik dan status ABK yang diculik. Otoritas Indonesia, Malaysia, dan Filipina terus meningkatkan upaya patroli.

Gambar 3: Jumlah Pembajakan Kapal 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
Tipe Kapal	Bulk carrier (6)	Bulk carrier (2)	Fishing boat (1)	Fishing
	Tug boat (5)	Tug boat (1)	Container ship(1)	boat (2)
	Fishing boat (3)	Fishing boat (1)		
	General cargo (1)	General cargo (1)		
	Product tanker (1)	Container ship(1) Passenger/Cargo(1)		
TOTAL	16	7	2	2
Status Kru kapal (Per 31 Des 2019)				
Kru dibebaskan/diselamatkan (67)				
Awak tewas (10)				
Kru di tahan (1)				

Jika kita melihat dan mengacu pada data dan angka-angka jumlah kejadian pembajakan di wilayah perairan Sulu tersebut, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina mulai dari melakukan upaya pengamanan serta patroli bersama hingga upaya pembebasan sandera cukup berhasil. Namun sebelum itu, kita harus melihat bagaimana kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini berada dalam level atau skala kolaborasi dalam teori efektivitas rezim.

Skala kolaborasi ini digunakan untuk melihat sejauh mana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Filipina yang pada akhirnya nanti dapat dilihat tingkat efektivitas kerjasama tersebut. Skala kolaborasi tersebut terdiri atas enam level, yakni :

¹² *Lagi-dua-kapal-indonesia-dibajak-*.
<https://www.voaindonesia.com/a/di akses pada>
 3 Agustus 2021

0. Gagasan bersama tanpa suatu koordinasi tindakan bersama
1. Koordinasi tindakan secara diam-diam
2. Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Tidak ada penilaian terpusat mengenai efektivitas dari sebuah tindakan.
3. Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Terdapat penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan.
4. Koordinasi yang terencana, dikombinasikan dengan implementasi pada level nasional. Didalamnya terdapat penilaian terpusat akan efektivitas sebuah tindakan.
5. Koordinasi dengan perencanaan dan implementasi yang menyeluruh terintegrasi, dengan penilaian terpusat akan efektivitas

Untuk dapat menentukan skala kolaborasi tersebut, penulis menganalisisnya dengan mengambil tiga poin utama yang terdapat dalam skala kolaborasi tersebut untuk kemudian dilihat sudah sejauh mana ketiga poin tersebut di dalam kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ketiga poin tersebut adalah *Output*, *Outcome*, dan *Impact*. Skala atau level kolaborasi ini juga dipengaruhi kuat oleh independent variable yang telah dijelaskan sebelumnya.

Koordinasi Terintegrasi (Output)

Output yang dimaksud disini adalah hasil yang dicapai dari proses pembentukan kerjasama dalam menangani permasalahan pembajakan kapal antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Output ini berupa kesepakatan-kesepakatan antara kepala negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Disini kita dapat melihat output sebagai sebuah langkah awal dalam upaya menghadapi suatu permasalahan, dalam kata lain sebagai bentuk koordinasi antar pihak-pihak yang bekerjasama. Koordinasi pertama yang dilakukan oleh ketiga negara adalah dengan keseriusan akan upaya penanganan permasalahan pembajakan kapal yang terlihat ketika pada tahun 2016, tepatnya pada bulan September atau hanya berselang tiga bulan dari pelantikan presiden Rodrigo Duterte, dirinya langsung terbang menuju ibukota Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.¹³ Hal tersebut tentu bukan

¹³ Parameswaran, P. (2016, September 13). *indonesia-and-the-philippines-enter-the-duterte-era/* Retrieved March 04, 2019, from

www.thediplomat.com:https://thediplomat.com/2016/09/ Pada 3 Agustus 2021

tanpa alasan karena beberapa bulan sebelumnya terdapat aksi pembajakan yang disinyalir dilakukan oleh kelompok ekstrimis yang mendiami wilayah selatan Filipina yakni kelompok Abu Sayyaf. Saat ini Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki fokus pertahanan dan keamanan yang sama-sama diarahkan ke wilayah perbatasan ketiga negara tepatnya di wilayah perairan Sulu hingga perairan Sulawesi.

Duterte yang datang membawa inisiatif peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan tidak lupa menyampaikan permintaan maafnya kepada pemerintahan Indonesia atas kejadian yang dialami kapal Indonesia di wilayah perairan Filipina. Inisiatif tersebut tentu merupakan bentuk output atau koordinasi yang tidak tertulis yang nantinya akan dan juga harus memiliki tindak lanjut. Menindak lanjuti pertemuan tersebut, Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina memiliki kesepakatan yang ditandatangani dalam bentuk *joint declaration*. Dalam kesepakatan tersebut, ketiga negara menyetujui tindakan patroli bersama, tindakan dalam menghadapi penyanderaan, dan tukar-menukar informasi. Kesepakatan ini merupakan output dalam bentuk *joint declaration* serta merupakan koordinasi terencana dengan memiliki poin-poin penting yang dituangkan sebagai bentuk kerjasama ketiga negara tersebut.

Melihat berbagai upaya koordinasi antar negara yang cukup baik, dapat dilihat bahwa Indonesia, Malaysia, dan Filipina sangat serius untuk dapat menangani permasalahan tindak kejahatan yang sangat mengganggu ini.

Koordinasi terencana yang dilakukan ketiga negara menjadi poin penting dalam menilai sejauh mana tingkat koordinasi atau kerjasama ketiga negara dalam memulai langkah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Implementasi Menyeluruh (Outcome)

Outcome berhubungan dengan adanya tindakan atau perubahan perilaku oleh masing-masing negara yang bekerjasama dalam hal ini adalah Indonesia dan Filipina. Outcome dari rezim atau kerjasama yang dibentuk oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini dapat dikatakan berjalan dengan baik karena terdapat tindakan nyata atau implementasi di ketiga negara dalam menyikapi kerjasama yang dijalankan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya upaya implementasi yang dilakukan oleh ketiga negara yang tentu dalam skala internasional untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Perubahan perilaku yang dimaksud disini adalah ketika terdapat komitmen yang kuat dalam menyelesaikan suatu permasalahan bersama, ketiga negara juga akan bersama-sama untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengimplementasikan berbagai cara yang telah disepakati dalam koordinasi yang sudah direncanakan sebelumnya.

Implementasi pertama terlihat pada tahun 2016 ketika Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang menandatangani *joint declaration* mengenai penanganan permasalahan pembajakan kapal. Pada tahun 2016 tersebut dimulai dengan patroli bersama yang dilakukan oleh negara Indonesia, Malaysia, serta Filipina yang mana patroli tersebut

dilakukan dengan tujuan mengamankan wilayah perairan dari berbagai ancaman yang terdapat disana terutama ancaman dari para perompak kapal. Selain itu juga pada tahun yang sama, ketiga negara mulai saling terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan pembajakan kapal di kawasan perbatasan ketiga negara tersebut serta membuka *hotline* dan *crisis center* serta penyusunan Standard Operational Procedure (SOP).

Kemudian pada tahun 2019 bersama dengan Kementerian Pertahanan, pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina mulai melakukan latihan militer bersama. Latihan gabungan tersebut merupakan upaya untuk mempersempit ruang gerak terorisme dan kelompok ekstrimis yang merupakan pelaku pembajakan kapal yang selama ini beroperasi di perairan Sulu yang menjadi perbatasan ketiga negara.¹⁴

Berbagai upaya dan implementasi dari kerjasama yang diusung oleh Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina tersebut memperlihatkan adanya kepentingan yang sama dari ketiga negara yang berasal dari komitmen bersama sebagai pihak yang memiliki permasalahan serupa. Implementasi tersebut juga dilakukan secara menyeluruh dalam artian tidak hanya terfokus atau dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan ketiga negara memiliki peran penting dan juga bergerak dengan melakukan aksi nyata.

Penilaian Hasil (Impact)

Kemudian terdapat impact yang berhubungan dengan terciptanya situasi tertentu yang ingin dicapai dengan terbentuknya suatu rezim atau kerjasama. Dalam permasalahan pembajakan kapal ini tentu situasi yang ingin diciptakan adalah situasi kondusif dan aman di sekitar perbatasan ketiga negara yakni di sekitar perairan Laut Sulu. Jika melihat situasi yang ingin dicapai tersebut, situasi kondusif dan aman sudah dapat dipenuhi namun masih harus dalam pengawasan dan penjagaan yang serius. Hal tersebut karena jika kita melihat pada jumlah kejadian pembajakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang memang terus berkurang, namun belum dapat dihilangkan secara menyeluruh karena memang wilayah operasi para pelaku pembajakan ini cukup luas dan memiliki siasat atau modus operasi yang baru.

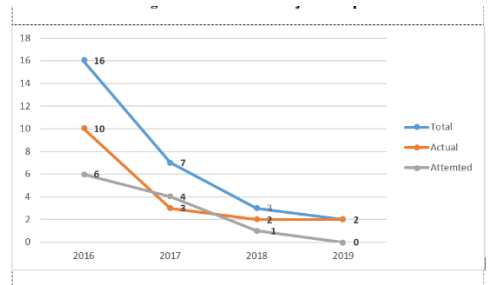
Pada grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa pasca berjalannya patroli terkoordinasi Indomalphi tingkat kejahatan di Laut Sulu mengalami penyusutan yang signifikan. Pada tahun 2016 sebelum terbentuknya kerjasama, kasus pembajakan kapal mengalami peningkatan terdapat 10 aksi langsung dan 6 percobaan. Kemudian pada tahun 2017 dimana Indomalphi mulai diluncurkan terdapat 7 kejadian dengan 3 berbentuk percobaan dan 4 berupa aksi langsung, pada tahun 2018 dimana Indomalphi sudah berjalan memasuki 1 tahun operasinya hanya terdapat 3 kejadian dengan 1 percobaan dan 2 aksi

¹⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *penutupan-latihan-bersama-indomalphi-middle-land-exercise-2019*.

<https://www.kemhan.go.id/2019/08/07/> Pada 3 Agustus 2021

langsung. Dan pada tahun 2019 dimana Indomalphi sudah berjalan memasuki 2 tahun operasinya hanya terdapat 2 aksi langsung.

Gambar 4: Pergerakan Jumlah Pembajakan Kapal 2016-2019



Begitu pula dengan tindak pidana kelautan dan perikanan pada grafik di bawah ini, yang meliputi Illegal fishing dan penyeludupan barang illegal seperti narkoba. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan, dari 237 kasus yang terjadi 220 kasus masih dalam tahap proses hukum. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan meskipun jumlah kasus yang terjadi di antara 2 tahun tersebut tidak terlalu mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian pada 2019 penurunan jumlah kasus yang terjadi sangat jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu berjumlah 151 kasus dan 114 kasus masih dalam tahap proses hukum.

Gambar 5: Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Tahun Kejadian	Jumlah Kasus	Pemeriksaan Pendahuluan	Sanksi Administrasi	Tindakan Lain	Proses Hukum
2016	237	1	12	4	220
2017	197	-	27	7	163
2018	193	-	31	1	161
2019	151	1	32	4	114
Total	778	2	102	16	658

Berdasarkan pengukuran terhadap *output*, *outcome*, dan *impact* di atas, dapat dikatakan bahwa proses implementasi dari kerjasama yang dibentuk oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menghadapi masalah pembajakan ini memang cukup baik dan dapat dikatakan efektif. Berdasarkan analisis kerumitan masalah terkait kerjasama peningkatan keamanan dan pertahanan dalam menghadapi pembajakan kapal, dapat dikatakan bahwa tingkat kolaborasi anggota rezim kerjasama ini berada level 4. Adapun level kolaborasi tingkat 4 yaitu:

Adanya koordinasi yang terencana, dikombinasikan dengan implementasi pada level nasional. Didalamnya terdapat penilaian terpusat akan efektivitas sebuah tindakan.

Rezim Kerjasama Indonesia dan Filipina juga dikatakan efektif karena mempunyai efektivitas cukup tinggi dan kolektif optimum cukup tinggi pula. Artinya, ketiga negara menandatangani kesepakatan. Mereka setuju dengan isi perjanjian dan melakukan suatu tindakan (aksi) untuk melaksanakan kesepakatan yang ada (*joint statement and joint declaration*)

tetapi belum mampu menciptakan suasana yang kondusif di perairan Asia Tenggara. Artinya disini tujuan terciptanya rezim ini berada pada dimensi yang memiliki nilai penting tinggi namun masih memiliki jarak yang cukup lebar untuk menuju tujuan atau visi yang hendak dicapai karena permasalahan ini belum dapat dihilangkan sepenuhnya, baik itu permasalahan pada negara anggota dan juga angka kejadian pembajakan kapal serta kejahatan diperairan Laut Sulu yang belum dapat diatasi sepenuhnya.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan dipimpin Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI J. Binsar Parluhutan Sianipar, bersama Undersecretary for Capability Assessment and Development Department of National Defense, the Philippines Undersecretary Cesar B. Yano, dan Director Maritime Security and Sovereignty Division, National Security Council, Prime Minister's Department of Malaysia Mr. Roselin bin Rajab, memimpin The 15th INDOMALPHI Joint Working Group on Trilateral Cooperative Arrangement (JWG on TCA), yang berlangsung secara daring pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli 2021. Pertemuan JWG Meeting on TCA ini membahas implementasi dan operasionalisasi kerangka kerjasama TCA antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam bentuk langkah-langkah mengatasi masalah keamanan di daerah maritim yang menjadi perhatian bersama. Selain itu, pertemuan ini juga membahas mengenai Standard Operating

Procedures (SOPs) dan Operating Guidelines.

Pada sesi pembukaan, ketiga negara berkomitmen untuk terus melanjutkan kerja sama dibawah kerangka TCA di Maritime Areas of Common Concern meskipun terdapat banyak hambatan dikarenakan pandemi Covid-19. Dirkersinhan Brigjen TNI J. Binsar Parluhutan Sianipar secara khusus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Filipina khususnya the Western Mindanao Command (Westmincom) atas keberhasilan operasi pembebasan keempat WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf Group (ASG). Dengan dibebaskannya keempat WNI tersebut, tidak ada lagi WNI yang menjadi sandera ASG.

III. KESIPULAN

Perkembangan isu dan aktor dalam hubungan internasional secara langsung mengubah situasi keamanan dari tradisional menuju non-tradisional. Ketidakstabilan keamanan kawasan di Asia Tenggara menjadi sorotan baik skala regional maupun internasional. Isu keamanan laut terasa paling dominan karena geografis Asia Tenggara yang terdiri atas negara-negara dengan banyak pulau. Ancaman keamanan di laut juga beragam, lebih dari sekedar masalah tarik-menarik hak kedaulatan dan penentuan batas laut dengan negara tetangga. Tetapi laut dimanfaatkan untuk berbagai aksi terorisme, tindak kejahatan laut dan kegiatan ilegal yang merugikan banyak pihak. Selain Selat Malaka, Laut Sulawesi-Laut Sulu menjadi salah satu titik rawan akan tindak kejahatan laut

berupa perompakan kapal dan penculikan anak buah kapal.

Pembajakan kapal dan sejumlah aksi terorisme di laut adalah bentuk perang asimetris yang melibatkan aktor-aktor bukan negara sebagai instrumen utama yang mengganggu keamanan negara terutama di perbatasan. Laut Sulawesi-Sulu terletak pada tri-border area sehingga menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab dan kepentingan yang berlarut-larut. Disatu sisi, jika tidak ditangani dengan tepat dapat merusak kepercayaan internasional sebagai salah satu jalur perdagangan utama. Selama ini negara mengedepankan pendekatan militer sebagai tumpuan utama di masing-masing negara dengan mengandalkan kekuatan armada laut.

Peningkatan keamanan dan stabilitas di perbatasan membutuhkan koordinasi yang bersifat jangka panjang. Upaya diplomasi juga difokuskan untuk menyamakan persepsi tiga negara tentang keamanan, keselamatan navigasi serta lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut, tentu membutuhkan kerjasama dan pemahaman yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini adalah pihak pemerintah Indonesia, Malaysia, dan juga pihak pemerintah Filipina. Selain itu juga diperlukan kekuatan pertahanan dan keamanan yang baik pula karena permasalahan yang dihadapi sangat erat kaitannya dengan kekuatan pertahanan dan keamanan dari masing-masing negara. Kerja sama ini ditandai dengan pertemuan tiga menteri pertahanan selama tahun 2016

hingga tahun 2017. Ancaman keamanan di Laut Sulu-Sulawesi mendorong pemerintah negara tri border area untuk mengadakan deklarasi bersama (joint declaration) di Yogyakarta, 5 Mei 2016. Kerja sama ini kemudian dibakukan dalam (Framework on Trilateral Cooperative Agreement between Malaysia, Indonesia and the Philippines) pada 14 Juli 2016 sekaligus membahas SOP yang akan dilaksanakan. Kerja sama ini diharapkan dapat meredam tindak kejahatan serta penculikan oleh Kelompok Abu Sayyaf dan dapat mengangkat citra negara-negara tri border area yang dianggap tidak mampu mengatasi ancaman di Laut sulu-sulawesi.

Penelitian ini akan melihat bagaimana berbagai kerjasama yang telah dijalin antara Indonesia dan Filipina tersebut berjalan dan bagaimana hasilnya apakah sudah efektif atau belum dan berhasilkah tujuan dan visi yang hendak dicapai oleh masing-masing pihak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penulis meminjam kerangka teoretis Arild Underdall tentang bagaimana rezim diukur keefektifannya dengan menilai bagaimana output dan outcome kerjasama Indomalphi ini. untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas rezim kerjasama yang dijalin oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menghadapi permasalahan pembajakan kapal di wilayah perbatasan kedua negara, atau lebih tepatnya di Kawasan perairan Sulu. Untuk melihat sejauh mana tingkat

efektivitas rezim kerjasama tersebut, peneliti melakukan analisis dengan melihat bagaimana koordinasi dan implementasi kerjasama yang dilakukan oleh ketiga negara hingga menghasilkan beberapa data yang menunjukkan jumlah kejadian pembajakan kapal di Kawasan perairan Sulu dari tahun 2016-2019. Selain itu, peneliti juga menganalisis kerumitan masalah pada rezim kerjasama ini.

Berdasarkan pengukuran terhadap output, outcome, dan impact yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa proses implementasi dari kerjasama yang dibentuk oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menghadapi masalah pembajakan ini memang cukup baik dan dapat dikatakan efektif. Berdasarkan analisis kerumitan masalah terkait kerjasama peningkatan keamanan dan pertahanan dalam menghadapi pembajakan kapal, dapat dikatakan bahwa tingkat kolaborasi anggota rezim kerjasama ini berada level 4. Adapun level kolaborasi tingkat 4 yaitu:

Adanya koordinasi yang terencana, dikombinasikan dengan implementasi pada level nasional. Didalamnya terdapat penilaian terpusat akan efektivitas sebuah tindakan.

Rezim Kerjasama Indonesia dan Filipina juga dikatakan efektif karena mempunyai efektivitas cukup tinggi dan kolektif optimum cukup tinggi pula. Artinya, ketiga negara menandatangani kesepakatan. Mereka setuju dengan isi perjanjian dan melakukan suatu tindakan (aksi) untuk

melaksanakan kesepakatan yang ada (joint statement and joint declaration) tetapi belum mampu menciptakan suasana yang kondusif di perairan Asia Tenggara. Artinya disini tujuan terciptanya rezim ini berada pada dimensi yang memiliki nilai penting tinggi namun masih memiliki jarak yang cukup lebar untuk menuju tujuan atau visi yang hendak dicapai karena permasalahan ini belum dapat dihilangkan sepenuhnya, baik itu permasalahan pada negara anggota dan juga angka kejadian pembajakan kapal serta kejahatan diperairan Laut Sulu yang belum dapat diatasi Sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Bakar Eby Hara. 2011. *Pengantar analisis politik luar negeri : dari realisme sampai konstruktivisme*. Bandung. Nuansa Cendikia. Hal 43.

Burchill, Scott, dkk. *Theories of International Relations*. (Third Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2005)

Buzan, Barry. (1991), Ole Waver, & Jaapde Wilde, (1998), *Security: A new Framework for Analysis*, Boulder Colo: Lynne Rienner,

Holsti, KJ. *Governance Without Government: Order and Change in World Politics* dalam *Governance Without Government: Polyarchy in Nineteenth-Century European International Politics*. (Cambride, 1998)

Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 2013)

McNicholas, Michael. 2008. "Maritime Security an Introduction". Oxford: Elsevier

I Underdal, A. (2001). Explaining Regime Effectiveness. University of Oslo.

Underdal, A. (2002). *One Question, Two Answers*. Dalam Environmental Regime Effectiveness : Confronting Theory with Evidence (hal. 4). Massachusetts: The MIT Press.

Jurnal

Adam J. Yung dan Mark J. Valencia, —Conflation of Piracy and Terrorism in Southeast Asia: Rectitude and Utilityll, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25, No. 2 (Augustus 2003): 272 [e-Jurnal] diunduh dari <http://www.jstor.org/stable/25798643> pada 20 Juni 2021

Ade Nurul Rezky," KERJASAMA TRILATERAL INDONESIA MALAYSIA FILIPINA DALAM MENANGGULANGI KELOMPOK TERORIS ABU SAYYAF"2017.pdf Pada 22 Juni 2021

Arild Underdal, Explaining Regime Effectiveness, [Pdf], University of Oslo, Hal.1 Pada 26 juli 2020

Underdal, A. (2002). *One Question, Two Answers*. Dalam Environmental Regime Effectiveness : Confronting Theory with Evidence (hal. 4). Massachusetts: The MIT Press.

Website

Abu-sayyaf-men-abduct-school-principal-in-basilan. <http://newsinfo.inquirer.net/590576/> diakses pada 3 Agustus 2021

Are-minilaterals-the-future-of-asean-security. [eastasiaforum.org/2017/09/30/di akses pada tanggal 24 Februari 2019](http://eastasiaforum.org/2017/09/30/di-akses-pada-tanggal-24-Februari-2019)

Bernama (2017). *Malaysia, Indonesia, the Philipines to jointly air patrol over Sulu Seas*. [online] The Borneo Post. Available at: <http://www.theborneopost.com/2017/10/13/malaysia-indonesia-the-philippines-to-jointly-air-patrol-over-sulu-seas>. Pada 22 Juni 2021

Budge Issue Brief. Pusat Kajian Anggaran DPR Vol 01 Ed 7 Mei 2021/ <https://berkas.dpr.go.id/puskaji-anggaran/bib/public-file/bib-public-26.pdf> Pada 22 Juni 2021

"Buku putih pertahanan Indonesia." Disetujui oleh menteri pertahanan. Peraturan No. 23/2015.20 November 2015. <https://www.kemhan.go.id-INDONESIA-DEFENSE-WHITE-PAPER-ENGLISH->

VERSI.pdf Diakses pada 19 Juni 2021

Data-penanganan-pelanggaran-2014-2018/<https://kkp.go.id/> Pada 20 Juni 2021

Data Penanganan pelanggaran tahun 2016-2019 .
<https://kkp.go.id/djpsdkp/page/4458-data-penanganan-pelanggaran-tahun-2021> Pada 3 Agustus 2021

Joint-Declaration-10th-ADMM-25-May-2016-Promoting-Defence-Cooperation.pdf.
www.asean.org/storage/2016/05/ Di akses 21 Juli 2021

Joint Statement Trilateral Meeting Among The Defence Ministers of The Philippines, Malaysia, and Indonesia [Online] diakses di:
[http://dnd.gov.ph/PDF2016/Press-Trilateral-Meeting-among-the-Defence-Ministers-of-the-Philippines,Malaysia and Indonesia.pdf](http://dnd.gov.ph/PDF2016/Press-Trilateral-Meeting-among-the-Defence-Ministers-of-the-Philippines,Malaysia%20and%20Indonesia.pdf) Pada 22 Juni 2021.

Kapal-indonesia-kembali-dibajak-ini-kata-menkoplhukam-
<https://nasional.sindonews.com/read/1101574/14/> 2 diakses pada 3 Agustus 2021

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia<https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/trilateral-maritime-patrol-indomalphi-resmi-dimulai.html>
di akses pada 21 Februari 2019

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.<https://www.kemhan>

[.go.id /2017/06/19/indonesia-malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama patroli-maritim-terkoordinasi.html](https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/indonesia-malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama-patroli-maritim-terkoordinasi.html) di akses pada 22 Februari 2019